

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat

Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2018 di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu berkisar antara 32.89% hingga 38.25%, dengan rata-rata 35.60% yang dapat dikategorikan cukup baik. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 38.25% dan yang terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 32.89%. Sedangkan kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2018 di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi. Kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu berkisar antara 28.04% hingga 35.30%, dengan rata-rata 30.13% yang dapat dikategorikan cukup baik. Kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 35.30% dan yang terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 28.04%.

2. Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat

Tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2018. Tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 108.03% dan yang terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 102.52%. Rata-rata tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 105.26% atau dapat dikatakan sangat efektif. Lalu, tingkat efektivitas bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2018. Tingkat efektivitas bea balik nama kendaraan bermotor tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 108.19% dan yang terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 101.51%. Rata-rata tingkat efektivitas bea balik nama kendaraan bermotor adalah sebesar 104.75% atau dapat dikatakan sangat efektif. Sedangkan tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2018. Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 105.75% dan yang terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 101.60%. Rata-rata tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 104.27% atau dapat dikatakan sangat efektif.

3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Analisis SWOT.

Hasil analisis SWOT Badan Pendapatan Daerah menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi, yaitu: Strategi SO yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif; Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan; Optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah; Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan dengan unsur pemerintah pusat; Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan; Memberlakukan *system reward* untuk pencapaian kinerja organisasi, Strategi WO yaitu dengan meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif; Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi; Revitalisasi peran dan skala usaha BUMD; Menerapkan SOP yang makin teruji; Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif; Mempertajam sistem pengendalian kinerja; Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan seluruh stakeholder, Strategi ST yaitu dengan penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten; Inisiasi sumber-sumber pendapatan dari masyarakat, Strategi WT yaitu dengan peningkatan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan; Memperkuat kemampuan analisis yang makin akurat terhadap kondisi makro ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan penyusunan asumsi-asumsi perhitungan pendapatan daerah; Melakukan standarisasi

sapras pengelolaan pendapatan; Meningkatkan penyediaan sentra-sentra layanan pendapatan yang berpusat di komunitas publik.

4. Upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor agar tetap memenuhi target.

Upaya dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam upaya ekstentifikasi adalah dengan terdapatnya cabang-cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi yang tersebar luas di seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang merupakan sub unit organisasi Badan Pendapatan Daerah disertai dengan outlet-outlet layanan pembantunya dalam menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Sedangkan upaya intentifikasi faktor manusianya adalah dengan memberikan pemahaman dan kemampuan SDM terhadap peraturan perUU (aturan formal) dan telah dibuat Perda Pengukuran Kinerja dan Disiplin Pegawai serta rencana induk pengembangan SDM Jawa Barat; lalu faktor organisasinya adalah terdapatnya cabang-cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi yang tersebar luas di seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang merupakan sub unit organisasi Badan Pendapatan Daerah disertai dengan outlet-outlet layanan pembantunya dalam menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah; lalu faktor sarananya adalah dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana kerja unit-unit operasional Bapenda yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat; dan faktor administrasinya adalah dengan melakukan restruktur pegawai pelaksana dimana petugas

kasir diganti menjadi petugas BJB; dan faktor pengawasannya adalah melakukan Razia gabungan (bersama dengan Polda Jawa Barat dan Jasa Raharja) dan melakukan Sosialisasi melalui media sosial, media cetak, TV, dan sosialisasi secara langsung.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur penelitan, namun terdapat keterbatasan, yaitu wawancara yang tidak dapat dilakukan secara tatap muka dikarenakan narasumber tidak dapat ditemui secara langsung, sehingga peneliti melakukan wawancara lewat alat bantu. Wawancara lewat alat bantu ini dilakukan dengan wawancara respons langsung dan wawancara respons tidak langsung. Wawancara respons langsung merupakan wawancara yang dilakukan pada dimensi waktu yang bersamaan tanpa tatap muka, wawancara respons langsung dapat dilakukan dengan telepon dan *chatting*, sedangkan wawancara respons tidak langsung merupakan wawancara yang dilakukan dengan dimensi waktu yang berbeda, metode wawancara respons tidak langsung meliputi layanan pesan singkat (SMS), layanan pesan multimedia (MMS), dan email (Bahri, 2018: 89-90).

## 5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

### 1. Akademisi

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas dengan cara menambah periode tahun yang diteliti sehingga penelitian selanjutnya dapat menjadi lebih akurat dan tepat.

### 2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menjadikan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat agar dapat mempertahankan kontribusi dan tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang sudah baik.

